



KONSTRUKSI PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI TENGGARA: ANALISIS KOMPARATIF PERSPEKTIF *GOVERNANCE*

Andi Rahmat Nizar Hidayat^{1*}, Misbahuddin²

^{1,2} Ilmu Administrasi, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*E-mail correspondence: andirahmatnizarhidayat@unm.ac.id

ABSTRAK

Perubahan paradigma administrasi publik dari *government* menuju *governance* mendorong pemerintah daerah untuk tidak lagi hanya berfokus pada pengelolaan administratif, tetapi juga pada pembangunan yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada nilai publik. Dalam konteks tersebut, RPJMD dipahami bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan konstruksi politik dan tata kelola yang merefleksikan cara pemerintah daerah membingkai persoalan pembangunan, menentukan prioritas kebijakan, serta membangun legitimasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025–2029 melalui perspektif *governance*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen komparatif. Data utama berupa dokumen RPJMD dan RPJPD kedua provinsi yang dianalisis menggunakan *interpretive policy analysis* untuk mengidentifikasi framing masalah pembangunan, orientasi kebijakan, representasi aktor, dan nilai publik dalam narasi pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan mengonstruksi pembangunan dalam kerangka transformasi struktural yang menekankan daya saing daerah, konektivitas wilayah, investasi, hilirisasi industri, dan inovasi pembangunan. Model *governance* yang muncul cenderung berbentuk *strategic-collaborative governance* dengan terbukanya ruang kolaborasi antara pemerintah dan sektor non-negara. Sebaliknya, Sulawesi Tenggara membangun prioritas pembangunan berdasarkan karakter wilayah kepulauan dengan fokus pada pemerataan pembangunan, konektivitas antarpulau, pengurangan kesenjangan spasial, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kesejahteraan masyarakat. Model *governance* yang tercermin lebih bersifat *territorial-distributive governance* dengan dominasi peran negara dalam pembangunan daerah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan RPJMD sebagai konstruksi *governance* subnasional yang menunjukkan bahwa desentralisasi menghasilkan tipologi tata kelola daerah yang kontekstual dan variatif sesuai karakter wilayah masing-masing. Temuan ini memperkuat pentingnya penyusunan RPJMD yang partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah.

Kata kunci: rencana pembangunan jangka menengah daerah; desentralisasi; nilai publik; Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Received March 3, 2026

Revised May 5, 2026

Published May 31, 2026

ABSTRACT

The paradigm shift in public administration from government to governance has encouraged local governments to move beyond merely administrative management toward development that is collaborative, adaptive, and oriented toward public value. In this context, the Regional



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Warmadewa University

Medium-Term Development Plan (RPJMD) is understood not merely as a technocratic document, but as a political and governance construction reflecting how local governments frame development issues, determine policy priorities, and build public legitimacy. This study aims to analyze the construction of development priorities in the RPJMDs of South Sulawesi Province and Southeast Sulawesi Province for the 2025–2029 period from a governance perspective. The research employs a qualitative approach with a comparative document study design. The primary data consist of RPJMD and RPJPD documents from both provinces, which were analyzed using interpretive policy analysis to identify the framing of development issues, policy orientations, actor representations, and public values embedded in regional development narratives. The findings reveal that South Sulawesi constructs development within a structural transformation framework emphasizing regional competitiveness, territorial connectivity, investment, industrial downstreaming, and development innovation. The emerging governance model tends toward strategic–collaborative governance, characterized by expanding collaboration between government and non-state actors. In contrast, Southeast Sulawesi constructs development priorities based on its archipelagic characteristics, focusing on equitable development, inter-island connectivity, reduction of spatial disparities, and natural resource management aimed at community welfare. The governance model reflected is more territorial–distributive governance, marked by the dominant role of the state in regional development. The novelty of this study lies in positioning the RPJMD as a subnational governance construction, demonstrating that decentralization produces contextual and varied regional governance typologies shaped by each region’s characteristics. These findings highlight the importance of participatory, inclusive, and sustainability-oriented RPJMD formulation.

Keywords: *regional medium term development plan; decentralization; public value; South Sulawesi; Southeast Sulawesi*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan administrasi publik global dalam dua dekade terakhir menunjukkan terjadinya transformasi paradigma dari *government* menuju *governance*. Paradigma *government* menempatkan negara sebagai aktor dominan yang bekerja melalui mekanisme hierarkis dan birokratis, sedangkan *governance* menekankan pentingnya jejaring, kolaborasi, partisipasi, serta interaksi antarpemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tersebut lahir dari meningkatnya kompleksitas persoalan publik yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif formal. Pemerintah dituntut untuk mampu membangun koordinasi lintas sektor, memperkuat kapasitas kolaboratif, serta menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Matias Pereira (2023) menjelaskan bahwa *new public governance* merupakan evolusi dari model administrasi publik klasik yang mengintegrasikan aktor negara, sektor privat, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan publik. Sejalan dengan itu, Ingram dan Nitsenko (2021) melalui analisis komparatif menunjukkan bahwa model manajemen publik modern bergerak ke arah pendekatan kolaboratif dan adaptif, bukan lagi sekadar administratif dan prosedural. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan kontemporer tidak lagi berfokus

pada kontrol birokratis semata, tetapi pada koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam jejaring kebijakan.

Transformasi paradigma *governance* tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Reformasi pemerintahan pasca 1998 melahirkan perubahan mendasar melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui kembali melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa daerah bukan lagi sekadar pelaksana kebijakan pusat, melainkan aktor strategis dalam produksi kebijakan publik dan pembangunan daerah. Desentralisasi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristik wilayah, kapasitas ekonomi, serta kebutuhan masyarakat masing-masing. Dalam praktiknya, setiap daerah mengembangkan pendekatan pembangunan yang berbeda sesuai konteks geografis, sosial, dan politik yang dimiliki. Artayasa (2020) menegaskan bahwa implementasi otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi kebijakan. Sementara itu, Elwan (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pajak daerah di era otonomi menjadi instrumen penting dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah sebagai basis kemandirian fiskal. Artinya, otonomi daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kapasitas politik dan manajerial pemerintah daerah dalam merumuskan prioritas pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hadir sebagai dokumen strategis yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah terpilih selama lima tahun. Dokumen ini tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen perencanaan teknokratis, tetapi juga sebagai instrumen politik dan legitimasi. Strebel, Kübler, dan Marcinkowski (2018) menjelaskan bahwa legitimasi dalam tata kelola demokratis bertumpu pada dua dimensi, yakni input legitimacy yang berkaitan dengan partisipasi dan proses serta output legitimacy yang berkaitan dengan kinerja dan hasil kebijakan. Dalam konteks tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi medium artikulasi janji politik yang harus memperoleh legitimasi publik melalui proses partisipatif dan realisasi program pembangunan. Ramadhan (2018) dalam kajiannya mengenai dinamika politik pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menunjukkan bahwa proses persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif mencerminkan negosiasi kepentingan politik yang intens. Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara periode 2025 sampai 2029 dapat dipahami bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai konstruksi politik yang memuat orientasi nilai dan prioritas pembangunan masing-masing daerah.

Fenomena tersebut terlihat menarik ketika dibandingkan antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMD periode 2025–2029. Sulawesi Selatan cenderung menampilkan orientasi pembangunan yang menekankan transformasi struktural, daya saing wilayah, konektivitas ekonomi, dan penguatan pusat pertumbuhan regional. Sebaliknya, Sulawesi Tenggara lebih menekankan pemerataan pembangunan wilayah

kepulauan, penguatan konektivitas antarpulau, serta pengelolaan sumber daya alam berbasis karakter geografis daerah. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak dibangun dalam paradigma yang seragam, meskipun kedua provinsi berada dalam kerangka regulasi nasional yang sama. Karakter geografis, struktur ekonomi, kapasitas fiskal, serta dinamika politik lokal berpengaruh terhadap cara pemerintah daerah membingkai masalah pembangunan dan menentukan prioritas kebijakan.

Kajian mengenai *governance* di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada level nasional, terutama pada reformasi birokrasi, kebijakan publik makro, dan tata kelola pemerintahan pusat. Studi yang secara khusus mengkaji konstruksi nilai *governance* pada level provinsi, terutama di kawasan Indonesia Timur, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian komparatif antarprovinsi di Indonesia Timur jarang dilakukan secara sistematis, sehingga perbedaan orientasi pembangunan daerah belum banyak dieksplorasi secara konseptual. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dokumen kebijakan strategis juga umumnya dianalisis dari sisi capaian program atau indikator kuantitatif, bukan sebagai konstruksi nilai dan narasi politik yang merefleksikan paradigma tata kelola tertentu. Kesenjangan inilah yang mendorong pentingnya penelitian komparatif terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara periode 2025 sampai 2029 dalam perspektif *governance*.

Kajian mengenai *governance* di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada reformasi birokrasi, pelayanan publik, inovasi pemerintahan, serta tata kelola pada level nasional. Penelitian tentang RPJMD umumnya masih didominasi pendekatan evaluatif yang menitikberatkan pada capaian indikator pembangunan, efektivitas program, atau sinkronisasi kebijakan dengan agenda nasional. Studi yang secara khusus membaca RPJMD sebagai konstruksi politik dan narasi *governance* masih relatif terbatas, terutama pada level provinsi di kawasan Indonesia Timur. Penelitian komparatif antarprovinsi juga belum banyak dilakukan secara mendalam untuk melihat bagaimana perbedaan karakter wilayah menghasilkan orientasi *governance* yang berbeda. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan bahwa RPJMD masih jarang dipahami sebagai refleksi paradigma tata kelola, orientasi nilai publik, dan representasi relasi kekuasaan dalam pembangunan daerah.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini berupaya memperluas kajian *governance* pada level subnasional dengan menempatkan RPJMD sebagai teks kebijakan yang memuat konstruksi nilai, orientasi pembangunan, dan paradigma tata kelola pemerintahan daerah. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah daerah membangun legitimasi pembangunan melalui penyusunan prioritas kebijakan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dalam memperkuat penyusunan RPJMD yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada nilai publik.

Penelitian ini menggunakan perspektif *network governance*, *collaborative governance*, dan *public value* sebagai landasan analisis. Perspektif *network governance* yang dikembangkan Rhodes (1996) menekankan bahwa kebijakan publik dibentuk melalui interaksi berbagai aktor dalam jejaring pemerintahan. *Collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007) menempatkan kolaborasi multipihak sebagai elemen penting dalam proses pengambilan keputusan publik. Sementara itu, konsep *public value* dari Moore (1995) menegaskan bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya diukur melalui efisiensi administratif, tetapi juga dari

kemampuan pemerintah menghasilkan nilai publik yang dirasakan masyarakat. Integrasi ketiga perspektif tersebut digunakan untuk membaca bagaimana RPJMD membingkai masalah pembangunan, merepresentasikan aktor, membangun orientasi nilai, serta menentukan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana prioritas pembangunan dikonstruksi dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025–2029; (2) nilai-nilai *governance* apa yang tercermin dalam konstruksi prioritas pembangunan kedua provinsi tersebut; dan (3) bagaimana perbedaan orientasi pembangunan antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perspektif *governance*. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis komparatif RPJMD sebagai konstruksi *governance* pada level subnasional dengan menempatkan dokumen perencanaan daerah sebagai teks politik dan narasi tata kelola, bukan semata dokumen administratif pembangunan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen komparatif untuk memahami konstruksi prioritas pembangunan, orientasi nilai, serta paradigma *governance* yang tercermin dalam dokumen kebijakan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengujian hubungan statistik, melainkan pada penafsiran makna, narasi, dan representasi kebijakan yang terdapat dalam teks RPJMD. *Qualitative document analysis* memungkinkan dokumen dipahami sebagai sumber data kontekstual yang merefleksikan orientasi politik, nilai publik, dan strategi pembangunan pemerintah daerah melalui proses interpretasi dan pengkodean secara sistematis (Morgan, 2022; Nilamsari, 2017). Desain komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konstruksi prioritas pembangunan antara dua provinsi secara reflektif dan kontekstual. Objek penelitian adalah dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025 sampai 2029. Kedua dokumen ini dipilih karena menjadi dasar arah kebijakan pembangunan lima tahunan di tingkat provinsi. Data utama berupa dokumen RPJMD 2025 sampai 2029 dari kedua provinsi. Data pendukung adalah dokumen RPJPD 2025 sampai 2045 masing-masing provinsi untuk menilai kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan jangka panjang dan menengah (Fadli, 2021). Proses analisis data dilakukan dengan membaca secara menyeluruh dokumen kebijakan untuk memahami struktur, konteks, dan isi narasi pembangunan yang dibangun masing-masing pemerintah daerah. Tahap selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap framing masalah pembangunan, orientasi prioritas kebijakan, representasi aktor, serta nilai publik yang muncul dalam teks kebijakan. Penafsiran data dilakukan menggunakan pendekatan *interpretive policy analysis* dengan membaca kebijakan sebagai konstruksi makna yang merefleksikan paradigma dan orientasi *governance* tertentu (Rijali, 2019). Pada tahap akhir, hasil interpretasi kedua dokumen dibandingkan untuk menemukan pola persamaan dan perbedaan konstruksi prioritas pembangunan serta tipologi *governance* yang tercermin dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029.

Konstruksi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029 dibangun melalui keterpaduan visi pembangunan daerah, isu strategis, arah kebijakan, serta target pembangunan jangka menengah. Dokumen RPJMD menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi pada upaya transformasi struktural untuk memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan kawasan Indonesia Timur. Data dalam RPJMD memperlihatkan adanya penekanan pada peningkatan daya saing daerah, penguatan konektivitas wilayah, transformasi digital, pengembangan investasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus tersebut terlihat dari arah kebijakan pembangunan yang menempatkan sektor ekonomi, infrastruktur, dan reformasi tata kelola sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa framing pembangunan yang dibangun pemerintah daerah bersifat strategis dan kompetitif.

Interpretasi terhadap narasi kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membingkai pembangunan sebagai proses modernisasi wilayah yang harus terintegrasi dengan jaringan ekonomi regional dan nasional. RPJMD menempatkan konektivitas wilayah sebagai instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat distribusi pembangunan antarwilayah. Penguatan kawasan metropolitan Mamminasata, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan infrastruktur transportasi dan digital menjadi bagian penting dalam konstruksi kebijakan pembangunan. Perspektif tersebut sejalan dengan konsep *network governance* Rhodes yang menekankan pentingnya hubungan antaraktor dan jejaring wilayah dalam tata kelola pembangunan modern. Konstruksi kebijakan tidak lagi hanya berbasis batas administratif pemerintahan, tetapi mulai bergerak menuju pola integrasi wilayah berbasis konektivitas ekonomi dan digital.

Data sekunder dalam RPJMD juga menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan menargetkan peningkatan investasi daerah, pertumbuhan ekonomi yang kompetitif, serta penguatan hilirisasi industri sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah. Fokus pada inovasi, produktivitas ekonomi, dan integrasi pasar menunjukkan adanya orientasi pembangunan berbasis daya saing regional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi pembangunan dibangun melalui kemampuan pemerintah meningkatkan performa ekonomi daerah dan memperkuat posisi strategis provinsi dalam jaringan ekonomi nasional. Perspektif ini sejalan dengan konsep *public value* Moore (1995) yang menempatkan kinerja pemerintah dan kemampuan menghasilkan manfaat publik sebagai sumber legitimasi kebijakan. Nilai publik dalam RPJMD Sulawesi Selatan diproyeksikan melalui peningkatan efisiensi pembangunan, penguatan daya saing ekonomi, dan percepatan transformasi wilayah.

Representasi aktor pembangunan dalam RPJMD Sulawesi Selatan masih menunjukkan dominasi pemerintah daerah sebagai pengarah utama pembangunan. Perangkat daerah diposisikan sebagai instrumen utama implementasi kebijakan dan pengendalian pembangunan daerah. Meskipun demikian, narasi pembangunan memperlihatkan adanya ruang kolaborasi dengan sektor swasta, pelaku investasi, dan masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif, transformasi digital, serta pengembangan investasi daerah. Kecenderungan tersebut

memperlihatkan adanya orientasi menuju *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan Ansell dan Gash (2007), meskipun pola hubungan antaraktor masih berada dalam kendali kuat pemerintah daerah. Struktur kebijakan menunjukkan bahwa negara tetap menjadi aktor dominan, tetapi kebutuhan terhadap sinergi multipihak mulai diakomodasi dalam agenda pembangunan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model *governance* dalam RPJMD Sulawesi Selatan cenderung mengarah pada pola *strategic-competitive governance*. Pemerintah daerah berperan sebagai aktor strategis yang mengarahkan transformasi ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, dan membangun integrasi pembangunan berbasis jejaring ekonomi regional. Orientasi pembangunan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi internal, tetapi juga pada penguatan posisi Sulawesi Selatan dalam kompetisi kawasan Indonesia Timur. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari pola administrasi tradisional menuju tata kelola pembangunan yang lebih adaptif, kompetitif, dan berbasis jaringan.

Konstruksi Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029

Konstruksi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 dibangun melalui penekanan pada karakter wilayah kepulauan, pengelolaan sumber daya alam, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Dokumen RPJMD menunjukkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk mengatasi tantangan geografis berupa fragmentasi wilayah, keterbatasan aksesibilitas, serta ketimpangan pelayanan dasar antarwilayah kepulauan. Data dalam RPJMD memperlihatkan bahwa konektivitas antarpulau, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi fokus utama kebijakan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dipahami sebagai proses integrasi ruang kepulauan dan pengurangan kesenjangan spasial.

Narasi pembangunan Sulawesi Tenggara memperlihatkan hubungan yang kuat antara karakter geografis wilayah dan orientasi kebijakan pembangunan. Posisi Sulawesi Tenggara sebagai provinsi kepulauan menyebabkan pembangunan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan akses pelayanan publik dan penguatan konektivitas antarwilayah. RPJMD menempatkan pembangunan infrastruktur transportasi laut, peningkatan akses wilayah terpencil, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Pendekatan tersebut mencerminkan perspektif *territorial governance*, yaitu tata kelola pembangunan yang menempatkan ruang dan karakter wilayah sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan publik.

Data sekunder dalam RPJMD menunjukkan bahwa sektor pertambangan, kelautan, dan perikanan menjadi basis utama pembangunan ekonomi daerah. Strategi pembangunan diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi industri dan penguatan ekonomi lokal. Fokus pada pengelolaan sumber daya alam memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara masih bertumpu pada optimalisasi potensi geografis daerah. RPJMD juga menunjukkan adanya upaya menghubungkan pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa legitimasi pembangunan dibangun melalui kemampuan pemerintah menghadirkan pemerataan manfaat pembangunan dan memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dasar dan sumber ekonomi daerah.

Representasi aktor dalam RPJMD Sulawesi Tenggara memperlihatkan dominasi pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya dan koordinator pembangunan wilayah kepulauan. Keterlibatan aktor non-negara belum terlihat secara eksplisit sebagai mitra deliberatif dalam proses pembangunan daerah. Narasi kebijakan masih memperlihatkan pola hubungan yang relatif hierarkis dengan dominasi negara dalam menentukan arah pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola *governance* yang berkembang lebih dekat dengan konsep *governance as networks* oleh Rhodes (1996), di mana negara tetap menjadi pusat kendali dalam jaringan kebijakan publik. Peran sektor swasta dan masyarakat cenderung ditempatkan sebagai pendukung pembangunan, bukan sebagai aktor utama dalam proses formulasi kebijakan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa model *governance* dalam RPJMD Sulawesi Tenggara cenderung bersifat *territorial-distributive governance*. Pemerintah daerah berperan sebagai pengelola pembangunan lintas wilayah dengan fokus utama pada pemerataan pembangunan dan penguatan kohesi wilayah kepulauan. Legitimasi pembangunan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah mengurangi kesenjangan spasial dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Sulawesi Tenggara lebih menekankan keadilan wilayah dan distribusi manfaat pembangunan dibanding kompetisi ekonomi regional.

Analisis Komparatif Perspektif *Governance*

Untuk memperjelas perbedaan konstruksi prioritas pembangunan antara kedua provinsi, tabel berikut menyajikan perbandingan utama antara RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025–2029.

Tabel 1. Perbandingan Konstruksi Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029

Aspek Analisis	RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara
Framing masalah pembangunan	Pembangunan diposisikan sebagai transformasi struktural yang menekankan peningkatan daya saing daerah, stabilitas ekonomi, inovasi, serta integrasi ekonomi regional dan nasional.	Pembangunan dibingkai sebagai upaya mengatasi tantangan geografis wilayah kepulauan, keterbatasan aksesibilitas, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Orientasi prioritas pembangunan	Berorientasi pada penguatan daya saing regional, transformasi ekonomi, peningkatan konektivitas wilayah, dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.	Berorientasi pada pemerataan pembangunan wilayah kepulauan, peningkatan konektivitas antarpulau, serta penguatan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam.
Basis ekonomi pembangunan	Diversifikasi ekonomi melalui penguatan investasi, inovasi, integrasi ekonomi domestik dan global, serta peningkatan produktivitas sektor ekonomi daerah.	Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam seperti pertambangan, kelautan, dan perikanan dengan upaya peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Aspek Analisis	RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara
Pendekatan pembangunan wilayah	Pendekatan berbasis konektivitas wilayah dan penguatan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.	Pendekatan territorial <i>governance</i> yang menekankan integrasi ruang kepulauan serta pemerataan pelayanan dasar antarwilayah.
Peran aktor pembangunan	Pemerintah daerah berperan sebagai pengarah transformasi pembangunan dengan membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta dan pelaku ekonomi.	Pemerintah daerah berperan dominan sebagai pengelola sumber daya serta koordinator pembangunan lintas wilayah kepulauan.
Orientasi nilai publik	Nilai publik diarahkan pada peningkatan daya saing, efisiensi pembangunan, inovasi, serta integrasi wilayah.	Nilai publik diarahkan pada pemerataan pembangunan, keadilan spasial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah kepulauan.
Model <i>governance</i> yang tercermin	Cenderung mencerminkan model <i>strategic-competitive governance</i> dengan kecenderungan <i>collaborative governance</i> .	Cenderung mencerminkan model <i>territorial-distributive governance</i> dengan dominasi peran negara dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Sumber: Diolah dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029

Analisis komparatif antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara kedua provinsi tersebut mengonstruksi masalah pembangunan, orientasi nilai, representasi aktor, serta pola relasi dengan pemerintah pusat.

Pertama, dalam mendefinisikan masalah pembangunan, Sulawesi Selatan membingkai persoalan daerah sebagai tantangan transformasi struktural yang berkaitan dengan daya saing, inovasi, stabilitas ekonomi, serta integrasi dalam jaringan ekonomi regional dan nasional. Masalah pembangunan tidak semata dipahami sebagai ketimpangan sosial, tetapi sebagai kebutuhan untuk memperkuat posisi daerah dalam kompetisi wilayah. Sebaliknya, Sulawesi Tenggara lebih menekankan problematika spasial dan geografis, terutama karakter kepulauan, keterbatasan aksesibilitas, serta kesenjangan antarwilayah. Masalah pembangunan dikonstruksi sebagai persoalan pemerataan, distribusi layanan publik, dan optimalisasi potensi sumber daya alam dalam konteks fragmentasi ruang. Dengan demikian, Sulawesi Selatan cenderung problem-oriented pada transformasi ekonomi, sedangkan Sulawesi Tenggara lebih territorial-oriented pada integrasi ruang dan distribusi pembangunan.

Kedua, dari sisi orientasi nilai pembangunan, Sulawesi Selatan menunjukkan kecenderungan pada nilai daya saing, inovasi, konektivitas, dan metropolitanisasi sebagai motor pertumbuhan. Nilai yang dominan adalah efisiensi, produktivitas, dan integrasi ekonomi. Orientasi ini selaras dengan kerangka *public value* Mark H. Moore (1995), di mana legitimasi kebijakan diukur dari kemampuan pemerintah menciptakan nilai publik melalui peningkatan kinerja dan kapasitas institusional. Dalam konteks ini, nilai publik diproyeksikan melalui transformasi ekonomi dan penguatan posisi strategis daerah. Sementara itu, Sulawesi Tenggara lebih menonjolkan nilai pemerataan, keadilan spasial, dan pengelolaan sumber daya

alam yang menopang kesejahteraan masyarakat. Nilai publik di sini lebih distributif dan teritorial, dengan fokus pada akses dan pemerataan manfaat pembangunan.

Ketiga, terkait posisi aktor non-negara, Sulawesi Selatan secara implisit membuka ruang kolaborasi melalui narasi integrasi ekonomi, transformasi digital, dan penguatan jejaring wilayah. Meskipun negara tetap menjadi aktor sentral, strategi pembangunan mengandaikan keterlibatan sektor swasta, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong inovasi serta investasi. Pola ini mendekati kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007), di mana proses kebijakan membutuhkan interaksi dan sinergi multipihak, meskipun tidak selalu dirumuskan dalam forum deliberatif formal. Sebaliknya, dalam RPJMD Sulawesi Tenggara, negara tampil lebih dominan sebagai pengelola sumber daya dan pengarah pembangunan. Aktor non-negara tidak terlalu ditampilkan sebagai mitra deliberatif, melainkan lebih sebagai objek atau penerima manfaat kebijakan. Pola ini lebih dekat dengan konsep *governance as networks* ala Rhodes (1996) dalam arti negara masih memegang kendali kuat atas arah kebijakan, sementara jaringan aktor belum sepenuhnya menjadi arena negosiasi yang setara.

Keempat, dalam pola relasi pusat–daerah, Sulawesi Selatan cenderung menempatkan dirinya sebagai simpul strategis yang terintegrasi dalam agenda nasional dan kawasan. Relasi dengan pusat dibingkai sebagai sinergi untuk memperkuat daya saing dan integrasi ekonomi. Sebaliknya, Sulawesi Tenggara lebih menekankan keselarasan dengan kebijakan nasional sebagai kerangka normatif, terutama dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan kepulauan. Relasi pusat–daerah di Sulawesi Tenggara tampak lebih bersifat struktural dan administratif, sementara Sulawesi Selatan lebih menampilkan relasi yang strategis dan adaptif.

Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan lebih mendekati model *collaborative –strategic governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007), dengan kecenderungan pada penciptaan nilai publik melalui transformasi ekonomi sebagaimana dirumuskan Moore (1995). Sementara itu, Sulawesi Tenggara lebih merepresentasikan tata kelola yang bercorak birokratis-teritorial dengan orientasi pengelolaan sumber daya alam, yang lebih dekat dengan kerangka Rhodes (1996) tentang dominasi peran negara dalam jaringan kebijakan. Perbedaan ini menegaskan bahwa meskipun kedua provinsi berada dalam kerangka hukum yang sama, konstruksi prioritas pembangunan dan paradigma *governance* yang diadopsi dapat berkembang secara berbeda sesuai konteks geografis, ekonomi, dan politik masing-masing daerah.

Sintesis Tipologi *Governance*

Berdasarkan analisis komparatif terhadap konstruksi prioritas pembangunan dalam dokumen RPJMD kedua provinsi, dapat diidentifikasi tipologi tata kelola pemerintahan daerah yang berbeda. Sintesis antara temuan empiris dan kerangka teori *governance* menghasilkan tipologi *governance* yang dirangkum pada Tabel berikut.

Tabel 2. Tipologi *Governance* dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara

Dimensi <i>Governance</i>	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Perspektif Teori
Orientasi pembangunan	Transformasi struktural dan peningkatan daya saing regional	Pemerataan pembangunan wilayah kepulauan dan optimalisasi sumber daya alam	Public Value (Moore)

Dimensi Governance	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Perspektif Teori
Framing masalah kebijakan	Pembangunan dipahami sebagai peningkatan daya saing ekonomi dan integrasi wilayah	Pembangunan dipahami sebagai upaya mengatasi fragmentasi wilayah dan ketimpangan spasial	Network Governance (Rhodes)
Peran pemerintah daerah	Pemerintah berperan sebagai pengarah transformasi ekonomi dan fasilitator pembangunan	Pemerintah berperan sebagai pengelola sumber daya dan koordinator pembangunan wilayah	Governance Theory
Keterlibatan aktor non-negara	Terdapat ruang kolaborasi dengan sektor swasta dan pelaku ekonomi	Peran aktor non-negara relatif terbatas dan lebih bersifat pendukung	Collaborative Governance (Ansell & Gash)
Model hubungan antaraktor	Cenderung berbasis jejaring ekonomi dan kolaborasi pembangunan	Cenderung hierarkis dengan dominasi pemerintah daerah	Network Governance (Rhodes)
Nilai publik yang dihasilkan	Peningkatan daya saing ekonomi, konektivitas wilayah, dan inovasi pembangunan	Pemerataan pembangunan wilayah, akses layanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat kepulauan	Public Value (Moore)
Tipologi governance	<i>Strategic-collaborative Governance</i>	<i>Territorial-distributive Governance</i>	Sintesis teori governance

Sumber: Diolah dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Sulawesi Selatan membangun orientasi pembangunan berbasis transformasi struktural dan penguatan daya saing regional. RPJMD Sulawesi Selatan menempatkan konektivitas wilayah, integrasi ekonomi, investasi, dan inovasi sebagai instrumen utama pembangunan daerah. Konstruksi tersebut memperlihatkan adanya orientasi pembangunan yang kompetitif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi kawasan. Perspektif ini memperkuat argumentasi Moore (1995) mengenai *public value*, di mana legitimasi kebijakan dibangun melalui kemampuan pemerintah menghasilkan manfaat publik dalam bentuk peningkatan kapasitas ekonomi, efisiensi pembangunan, dan penguatan posisi strategis daerah. Pola hubungan antaraktor dalam RPJMD Sulawesi Selatan juga memperlihatkan kecenderungan kolaboratif melalui penguatan investasi, transformasi digital, dan jejaring pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan karakter *strategic-collaborative governance* yang mengombinasikan peran dominan pemerintah dengan kebutuhan sinergi multipihak dalam pembangunan daerah.

RPJMD Sulawesi Tenggara menunjukkan orientasi pembangunan yang berbeda. Pembangunan dibingkai sebagai upaya mengatasi fragmentasi wilayah kepulauan, memperkuat pemerataan pembangunan, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam daerah. Narasi pembangunan menempatkan konektivitas antarpulau, akses pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal sebagai prioritas utama kebijakan daerah. Perspektif tersebut

mencerminkan pendekatan *territorial governance* yang menempatkan ruang dan karakter geografis sebagai dasar utama perumusan kebijakan publik. Dominasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan memperlihatkan bahwa negara masih menjadi aktor utama dalam menentukan arah pembangunan wilayah. Keterlibatan aktor non-negara belum terlihat secara kuat sebagai bagian dari proses deliberatif pembangunan. Kondisi tersebut memperlihatkan karakter *territorial-distributive governance* yang berorientasi pada distribusi pembangunan dan penguatan kohesi wilayah.

Variasi tipologi *governance* antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara memperlihatkan bahwa desentralisasi tidak menghasilkan model pembangunan daerah yang seragam. Karakter geografis, struktur ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan dinamika politik lokal memengaruhi cara pemerintah daerah membangun prioritas pembangunan dan menentukan orientasi kebijakan. Temuan ini memperkuat argumentasi Rhodes (1996) bahwa *governance* berkembang melalui konfigurasi hubungan antaraktor yang berbeda sesuai konteks institusional dan sosial masing-masing wilayah. Kajian ini juga menunjukkan bahwa paradigma *collaborative governance* Ansell dan Gash (2007) dapat muncul dalam intensitas yang berbeda pada setiap daerah tergantung kapasitas pemerintah daerah dalam membuka ruang kolaborasi dan partisipasi pembangunan.

Kontribusi teoritis penelitian ini terletak pada penguatan kajian *subnational governance* di Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur yang masih relatif terbatas dalam studi administrasi publik dan kebijakan daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa RPJMD tidak hanya dapat dibaca sebagai dokumen administratif pembangunan, tetapi juga sebagai representasi paradigma tata kelola, orientasi nilai publik, dan strategi legitimasi pemerintah daerah. Pendekatan interpretatif terhadap RPJMD memungkinkan identifikasi terhadap cara pemerintah daerah membangun narasi pembangunan dan memproduksi legitimasi kebijakan melalui konstruksi prioritas pembangunan.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan dimensi partisipatif dan orientasi nilai publik dalam penyusunan RPJMD. Konstruksi pembangunan daerah perlu memperluas ruang deliberasi agar keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan aktor non-negara tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi bagian substantif dalam proses pembangunan daerah. Orientasi nilai publik juga perlu ditegaskan secara lebih konkret dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan tidak cukup diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tetapi harus dikaitkan dengan pemerataan akses layanan dasar, pengurangan ketimpangan wilayah, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2025–2029 dibentuk oleh konteks geografis, ekonomi, dan orientasi tata kelola yang berbeda pada masing-masing daerah. RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif pembangunan, tetapi juga menjadi representasi cara pemerintah daerah membingkai persoalan publik, menentukan arah kebijakan, serta membangun legitimasi pembangunan melalui nilai-nilai *governance* yang diusung.

Sulawesi Selatan cenderung mengonstruksi pembangunan dalam kerangka transformasi struktural yang berorientasi pada peningkatan daya saing daerah, penguatan konektivitas wilayah, integrasi ekonomi, serta inovasi pembangunan. Pemerintah daerah diposisikan sebagai aktor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi provinsi dalam jejaring kawasan Indonesia Timur. Pada saat yang sama, terdapat kecenderungan terbukanya ruang kolaborasi dengan sektor non-negara, meskipun pemerintah tetap menjadi pengendali utama arah pembangunan. Pola tersebut memperlihatkan karakter *strategic-collaborative governance* yang menempatkan efisiensi, konektivitas, dan daya saing sebagai nilai publik utama.

Berbeda dengan itu, Sulawesi Tenggara membangun prioritas pembangunan berdasarkan karakter wilayah kepulauan dan persoalan kesenjangan spasial antarwilayah. Fokus pembangunan diarahkan pada pemerataan akses, konektivitas antarpulau, penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan kepulauan. Dalam konteks ini, negara tampil lebih dominan sebagai pengelola pembangunan dan koordinator distribusi kebijakan. Model *governance* yang muncul cenderung bersifat *territorial-distributive governance* dengan penekanan pada keadilan wilayah dan pemerataan manfaat pembangunan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa desentralisasi di Indonesia tidak menghasilkan pola pembangunan daerah yang seragam. Setiap daerah mengembangkan orientasi *governance* yang berbeda sesuai kebutuhan, kapasitas, dan karakter wilayahnya masing-masing. Karena itu, penyusunan RPJMD seharusnya tidak hanya menekankan aspek teknokratis dan target administratif, tetapi juga memperkuat dimensi partisipatif, orientasi nilai publik, serta keterlibatan aktor non-negara agar pembangunan daerah menjadi lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative governance* in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Artayasa, I. N. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatan Penanganan Dampak Covid 19 Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*.
<http://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/198>
- Elwan, L. (2020). Analisis kebijakan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Kolaka Timur di era otonomi daerah. *Jurnal Publicuho*, 3(2), 247.
<https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12529>
- Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21, 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ingram, K., & Nitsenko, V. (2021). *Comparative analysis of public management models*.
<https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-4/122>
- Matias-Pereira, J. (2023). New public *governance*: Evolution and transformations in public administration. *Concilium*. <https://doi.org/10.53660/clm-1761-23106>
- Moore, M. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*.
- Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report*.

- <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- Nilamsari, N. (2017). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>
- Ramadhan, A. (2018). *Dinamika politik dalam pembahasan dan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021*.
- Rhodes, R. (2016). Recovering the craft of public administration. *Public Administration Review*, 76, 638–647. <https://doi.org/10.1111/puar.12504>
- Rhodes, R. A. W. (1996). The New *Governance*: Governing without *Government*. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Selatan, P. P. S. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Selatan, P. P. S. (2025). *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Strebel, M., Kübler, D., & Marcinkowski, F. (2018). The importance of input and output legitimacy in democratic *governance*. *European Journal of Political Research*. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12293>
- Tenggara, P. P. S. (2024). *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Tenggara, P. P. S. (2025). *Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.